



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020, tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-3369 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp3.068.566.443.639,92	
b. Belanja	Rp2.984.803.404.999,97	
Surplus/(Defisit)		Rp83.763.038.639,95
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 152.779.266.266,82	
- Pengeluaran	Rp 138.172.225.632,00	
Pembiayaan Netto		Rp 14.607.040.634,82

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp76.769.342,549,08 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|------------------------|----------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp3.145.335.786.189,00 | |
| b. Realisasi | Rp3.068.566.443.639,92 | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 76.769.342,549,08 |

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp175.139.421.824,03 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp3.159.942.826.824,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp2.984.803.404.999,97</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp175.139.421.824,03 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(98.370.079.274,95)dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|
| a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan | Rp (14.607.040.635,00) | |
| b. Realisasi | <u>Rp 83.763.038.639,95</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp (98.370.079.274,95) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,18 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|-----------------------------|---------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp152.779.266.267,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp152.779.266.266,82</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 0,18 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----------------------------|---------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp138.172.225.632,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp138.172.225.632,00</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,18 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------------------------|---------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 14.607.040.635,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp 14.607.040.634,82</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 0,18 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 152.779.266.266,82
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp(152.779.266.266,82)</u>
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 98.370.079.274,77</u>
Sub Total	Rp 98.370.079.274,77
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-Lain	<u>Rp 0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 98.370.079.274,77

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 6.883.236.642.447,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp 751.449.910.819,33
c. Jumlah Ekuitas	Rp 6.131.786.731.627,81

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
Pendapatan-LO	Rp 3.177.945.190.196,22	
Beban	<u>Rp 2.879.196.951.207,26</u>	
Surplus/(Defisit) dari Operasi		Rp298.748.238.988,96
b. Kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lain-LO	<u>Rp 2.654.664.884,75</u>	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		Rp 2.654.664.884,75
c. Pos Luar Biasa		
Beban Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		<u>Rp 0,00</u>
d. Surplus/(Defisit)-LO		Rp 301.402.903.873,71

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023	Rp	152.878.754.790,82
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	586.467.132.634,06
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(504.204.093.994,11)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(136.672.225.632,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<u>Rp</u>	<u>(98.270.651,00)</u>
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2023	Rp	98.371.297.147,77

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	5.830.383.827.754,10
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	301.402.903.873,71
Koreksi Ekuitas	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
c. Ekuitas Akhir	Rp	6.131.786.731.627,81

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
2. Lampiran I.1. : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran I.2. : Ringkasan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran I.3. : Rincian Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ;
5. Lampiran I.4. : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan ;
6. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ;
7. Lampiran III : Laporan Operasional ;
8. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas ;
9. Lampiran V : Neraca ;
10. Lampiran VI : Laporan Arus Kas ;
11. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan ;
12. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah ;
13. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ;
14. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir ;
15. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah ;
16. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
17. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap ;
18. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan ;
19. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya ;
20. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah ;

21. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek ;
22. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang ;
23. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya ;
24. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas ;
25. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah ;
26. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
27. Lampiran XXI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
28. Lampiran XXII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Pemenuhan Belanja Wajib Yang Diamanatkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan (*Mandatory Spending*);
29. Lampiran XXIII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
30. Lampran XXIV : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN);
31. Lampiran XXV : Realisasi Belanja Daerah Untuk Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
32. Lampiran XXVI : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk Percepatan Penurunan Stunting;
33. Lampiran XXVII : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
34. Lampiran XXVIII : Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Puchasing.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku	
Inspektur Daerah Provinsi Maluku	
Plt. Kepala BPKAD Provinsi Maluku	
Plt. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekda Maluku	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal

Pj. GUBERNUR MALUKU,

SADALI IE

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

SYURYADI SABIRIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (6-226/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,
SEKRETARIAT DAERAH MALUKU

HENDRIK R HERWAWAN, SH, MH
PEMBINA TK.I
NIP. 19660116 199503 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan SKPD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta Lampiran Kinerja dan kemudian di rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang berisikan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Berdasarkan hal ini tersebut maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 140